



PENERAPAN KONSEP "BLUE ECONOMY" SEBAGAI PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PERTAHANAN LAUT

IMPLEMENTING THE CONCEPT OF "BLUE ECONOMY" AS A SEA DEFENSE CAPABILITY BUILDING

Dyah Sekar Arum¹

Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan
Universitas Pertahanan RI
dyahsekar927@gmail.com

Abstrak – Permasalahan perbatasan Laut Natuna Utara dinilai sebagai sebuah ancaman Kawasan bagi Indonesia. Mengingat letak georgafis LNU yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN dan konflik Laut China Selatan yang sedang berlangsung. Melalui ini, maka penting bagi Indonesia untuk dapat mempersiapkan kedua kemungkinan, yang pertama perebutan Kawasan LNU, yang kedua dampak perang laut dari adanya konflik LCS. Maka konsep Ekonomi biru hadir, guna untuk dapat meningkatkan perekonomian negara dan menghidupkan Masyarakat pesisir. Sehingga dapat mengembangkan pertahanan laut secara bertahap, didaerah pesisir melalui adanya aktivitas ekonomi yang padat di perairan. Oleh karena itu, Indonesia diharuskan untuk mencoba memperkuat pertahanan laut melalui penerapan ekonomi biru. Dalam penelitian ini, maka peneliti akan difokuskan dengan studi kasus LNU dan urgensi penerapan ekonomi biru di Kawasan LNU sebagai pengembangan kemampuan pertahanan laut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder.

Kata Kunci: Ekonomi Biru, Pertahanan Laut, Laut Natuna Utara

Abstract – The North Natuna Sea border issue is considered a regional threat to Indonesia. Given NNS's geographic location which borders directly with ASEAN countries and the ongoing South China Sea conflict. Through this, it is important for Indonesia to be able to prepare for both possibilities, the first is the seizure of the NNS area, and the second is the impact of naval war from the SCS conflict. So, the concept of the Blue Economy is here, in order to improve the country's economy and revive coastal communities. So that we can develop sea defence gradually in coastal

areas through dense economic activity in the waters. Therefore, Indonesia is required to try to strengthen maritime defence by implementing a blue economy. In this research, researchers will focus on the NNS case study and the urgency of implementing the blue economy in the NNS area as a means of developing maritime defence capabilities in Indonesia. This research uses descriptive qualitative research methods with secondary data sources.

Keywords: *Blue Economy, Sea Defense, North Natuna Sea*

Pendahuluan

Konflik Laut China Selatan atau LCS merupakan sebuah bentuk konflik yang hingga saat ini tak kunjung terselesaikan. Hingga saat ini, LCS dikuasai oleh militerisasi china yang dinilai illegal. Kekuatan militer China di LCS berkembang dan menyebar tanpa kendali. Terdapat 3 bagian upaya china dalam meningkatkan kekuatan militer China yaitu, pertama militer China telah memasuki perbatasan yang dinilai merupakan bagian dari pelanggaran hukum. Kedua, China telah membangun pangkalan militer, dan terakhir China telah berupaya untuk memobilisasi maritim LCS melalui Coast Guard dengan tujuan dapat memastikan legalitas wilayah dan kegiatannya tanpa berdasarkan hukum internasional (Hwon, 2023).

Melalui arbitrase yang sebelumnya diajukan filiphina, pada akhirnya China merasa mengalami kekalahan argumen legalitas Sejarah wilayahnya yang ditolak UNCLOS. Tetapi, China tetap bersih keras mengakui dan menetapkan legal yang ada *pada the nine-dash line* sesuai dengan pembagian wilayah menurut sejarahnya. Nine Dash Line tersebut merupakan hasil penggambaran Sejarah tradisional China. Sejarah tradisional terbentuknya nine dash line tersebut dinyatakan China sebagai sebuah batas wilayah tradisional China secara geografis yang dikemukakan sejak 1946-1947. Tetapi penafsiran China mengenai perbatasan tradisional China tidak didukung oleh negara-negara sekitar termasuk US, karena digambarkan sebagai sebuah argument cacat dan kurang sesuai. Sehingga menimbulkan konflik dengan negara-negara perbatasan LCS (Ikeshima, 2013).



Gambar 1 : Perbatasan Tradisional China Nine Dash Line

Sumber: (Surwade, 2017)

Permasalahan tak kunjung selesai, dikarenakan penggunaan celah hukum laut China yang membangun pulau-pulau baru dengan artian pulau-pulau buatan manusia. Bentuk awal Pembangunan pulau di Kawasan LCS inilah yang mendasari adanya Pembangunan wilayah pulau baru dan proyek lainnya yang dilakukan oleh beberapa negara perbatasan LCS, seperti Filipina, Vietnam hingga Malaysia. Semua negara tersebut membangun proyek-proyek dalam skala kecil didaerah bebatuan yang tersebar Kawasan di LCS. Sehingga hukum laut UNCLOS yang sebelumnya di sepakati guna menjadi perdamaian negara-negara bersangkutan melemah. Negara-negara Pembangunan proyek-proyek kecil atau pun Pembangunan pulau buatan manusia tersebut masuk kedalam pelanggaran ZEE pada peraturan hukum laut Internasional. Disamping kekuatan China yang semakin menjadi-jadi mengakibatkan perselisihan tumbuh diantara negara-negara terlibat (Khoury, 2017). Tetapi hingga saat ini, permasalahan ini terus berjalan dikarenakan kekuatan militerisasi China yang kuat dan telah menyebar di LCS. Ditakutkan China dapat menyatakan perang apabila Kawasan tersebut dinyatakan sudah tidak aman lagi.



Pengaruh LCS ke Indonesia jelas sangat berdampak terutama ditahun 2016 lalu, Angkatan laut Indonesia menangkap kapal penangkap ikan milik China yang memasuki ZEE Indonesia di Laut Natuna. Tidak hanya sekali, di awal tahun 2023 ini, insiden kembali terjadi. Dimana kapal penangkap ikan China yang dikawal oleh Coast Guard memasuki area Laut Natuna. Beberapa keresahan ini, membuat Indonesia mengajukan protes diplomatik ke China dan kembali meningkatkan patrol di Laut Natuna, sesuai dengan regulasi hukum laut internasional ZEE (Humas FHUI, 2023). Aktivitas China di Kawasan LCS dapat di pandang melalui teori Realisme Struktural sebagai sebuah aktivitas yang bertujuan untuk mengembangkan hegemoni di Asia Timur (Kraska & Pedrozo, 2013)

Karena kekhawatiran mulai bermunculan setelah China meningkatkan Coast Guard dan sifat sembrono China yang tidak terkendali. Dari beberapa contoh perselisihan seperti, penenggelaman kapal Vietnam oleh Coast Guard China hingga pengeboran minyak bumi China yang menimbulkan perselisihan dengan Malaysia. Menjadikan kekhawatiran sekaligus keresahan bagi nara-negara terlibat. Oleh karena itu Indonesia menghimbau kepada semua pihak untuk tetap tenang dan menahan diri guna mengamankan kawasan regional Asia Tenggara. Walaupun Indonesia tidak termasuk kedalam sengketa LCS. Tetapi Indonesia, memiliki keterlibatan untuk menjaga keamanan maritim dikawasan negara-negara Asia Tenggara guna menjaga stabilitas dan perdamaian (Darmawan & Afriansyah, 2020).

Maka, dalam konflik yang ada, China merupakan sebuah kepentingan Indonesia memperkuat keamanan maritim nasional, Indonesia memiliki laut natuna yang berada diperbatasan LCS. Laut Natuna dan kedaulatan Indonesia bisa saja dalam keadaan berbahaya apabila suatu saat China menyatakan perang. Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk menciptakan dan ikut serta dalam menciptakan perdamaian. Beberapa strategi di inisiasi oleh Indonesia guna sebagai bentuk perdamaian negara-negara dan mencapai perdamaian. Beberapa strategi Indonesia yang di inisiasi adalah memperkuat patner dan aliansi, melakukan diplomasi guna mencapai Kerjasama Kawasan, regional secara multilateral. Disisi lain, sebagai bentuk pertahanan laut Indonesia juga memperkuat

militer Angkatan laut, armada dan pangkalan. Sebagai bentuk penjagaan ditakutkan hal tidak diinginkan tidak terjadi (Maujana, 2018).

Oleh karena itu maka peneliti berusaha untuk dapat meneliti Bagaimana Urgensi penerapan konsep “Blue Economy” pada Pembangunan kekuatan pertahanan laut. Dengan meneliti sebuah studi kasus laut natuna utara. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang diharapkan dapat memaksimalkan infomarsi dan sumber guna berjalannya penelitian.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berencana untuk menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif sebagai sebuah alat untuk meneliti. Adapun penelitian ini akan bersumber sesuai dengan fenomena dan datan yang ada, dengan memfokuskan penelitian terhadap permasalahan dan urgensi topik. Penelitian ini diteliti melalui penggunaan beberapa data sekunder yang berasal dari artikel, jurnal nasional maupun internasional, buku, website dan berita.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, maka peneliti akan meneliti mengenai urgensi penggunaan prinsip blue economy sebagai pengembangan pertahanan laut. Dengan studi kasus penelitain terfokuskan kepada laut natuna utara yang saat ini menjadi Kawasan perbatasan yang memiliki ancaman kuat atas keberadaan laut china Selatan. Maka, melalui penelitian ini, peneliti membuat sebuah kerangka berfikir sebagai alur dan arahan dalam pembawaan penelitian, sebagai berikut



Gambar 2: Kerangka Berfikir
Sumber: Dibuat oleh Peneliti

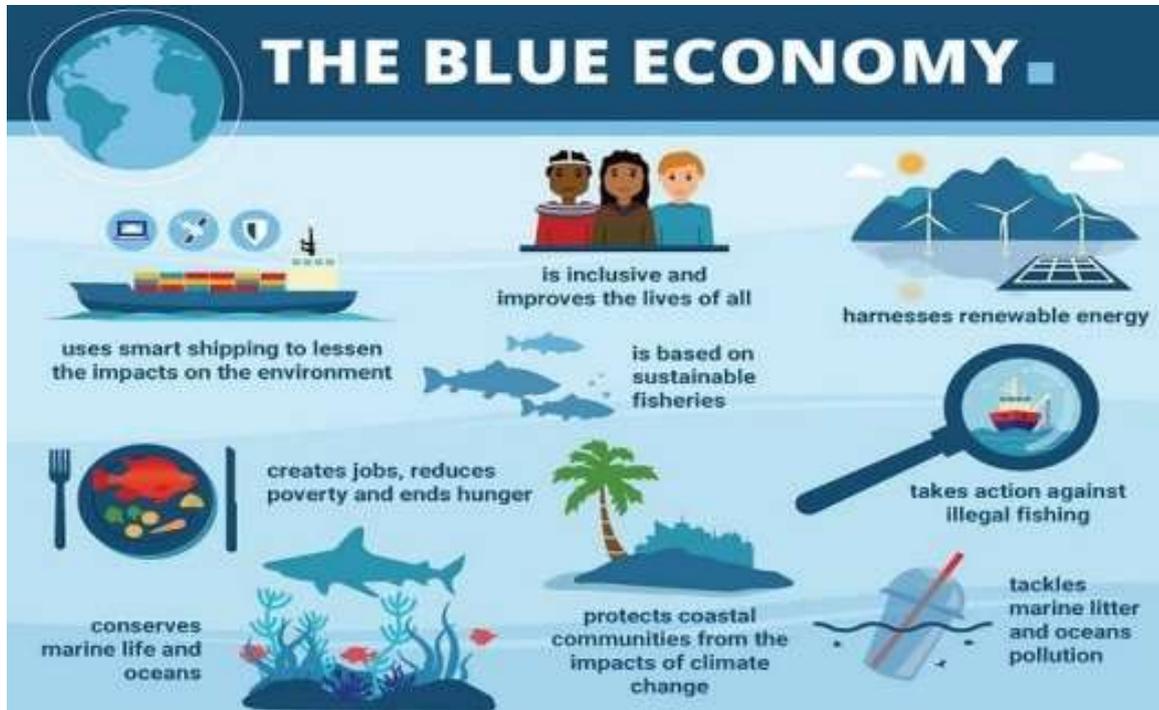
Pengertian Urgensi

Pengertian kata “Urgensi” dalam penelitian ini, memiliki arti umum yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sebuah bentuk keharusan yang mendesak (KBBI, n.d.). Sedangkan, dalam pengartian khusus dalam penelitian ini mengartikan bahwa adanya sebuah keharusan mendesak guna diterapkannya konsep blue economy di kawasan launt natuna utara sebagai bentuk Pengembangan kemampuan pertahanan laut. Sebagai sebuah keharusan yang mendesak mengingat laut natuna utara sebagai Kawasan perbatasan yang terdesak keberadaanya.

Pengertian Blue Economy

Ekonomi Biru atau Blue Economy merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah bentuk aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan laut (McBain, 2023). Sedangkan menurut World Bank, Ekonomi biru merupakan sebuah bentuk penggunaan atau pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan guna memberikan manfaat terstruktur baik bagi perekonomian negara, mata pencaharian hingga perbaikan dan kesehatan sirkulasi ekosistem laut. Mencangkup aktivitas penting seperti keterbaruan energi, perikanan, transportasi lau, manajemen laut, perubahan iklim hingga pariwisata

dinilai sebagai faktor pendukung dalam terciptanya ekonomi biru disuatu negara (World Bank, 2017).



Gambar 3: The Blue Economy
Sumber: Civilsdaily (2023)

Pada ilustrasi diatas mengilustrasikan perihal beberapa tantangan dan juga prospek kerja pada suatu negara dalam mencapai ekonomi biru, yaitu dari tantangan dimana diharuskan untuk adanya pengembangan teknologi cerdas dalam pengadaan jalur perdagangan dan kapal angkutan ang digunakan melalui jalur. Dengan harapan tidak memberikan pengaruh buruk pada lingkungan, pemeliharaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pesisir, guna menumbuhkan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan mengurangi angka kelaparan. Dibutuhkan adanya pergerakan untuk mengurangi illegal fishing, penjagaan lingkungan dan iklim guna menjaga ekosistem laut berkelanjutan (Civilsdaily, 2023).

Urgensi Penerapan Blue Economy di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara dengan $\frac{3}{4}$ bagian merupakan lautan. Sehingga memiliki urgensi dalam penerapan konsep blue economy. Pada kenyataanya Indonesia memiliki identitas dan kunci kesejahteraan melalui laut. Perihal ini dibuktikan dengan



tingkat sektor perikanan Indonesia yang menempati peringkat kedua setelah Tiongkok sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar didunia, bahkan sektor perikanan Indonesia diperkirakan dapat menompang 7 juta lebih lapangan pekerjaan nantinya (Kaczan & De Aquino, 2021).

Dari adanya keberadaan sumber daya laut Indonesia yang melimpah. Maka, penting sebuah perubahan menuju prinsip blue economy. Dimana menurut ringkasan World Bank, perubahan menuju blue economy penting dilakukan saat ini, setelah jatuhnya perekonomian dunia, dan pentingnya untuk melakukan perubahan guna pembangunan ekonomi laut berkelanjutan. Usaha perubahan tersebut dapat dilakukan dari timbulnya permasalahan sumber daya laut Indonesia, seperti penangkapan ikan dilaut atau illegal fishing yang sering terjadi, satu-pertiga dari terumbu karang di Indonesia mengalami kondisi buruk, puing-puing sampah laut yang mencapai hingga 450 triliun dollar setiap tahunnya dan lebih dari 50% mangrove terdegradasi. Oleh karena itu penting adanya perubahan sebagai tantangan sekaligus usaha untuk menumbuhkan perekonomian laut berkelanjutan guna mencapai konsep blue economy dengan beberapa cara sebagai berikut, Pembangunan berkelanjutan dan produktivitas pemancingan ikan dilaut, mengkoordinir pesisir dan asset laut, meningkatkan pariwisata sebagai pengembangan potensi wisatawan asing, mengontrol pembuangan sampah dilaut hingga mengintegrasikan kepentingan kebijakan blue economy di Indonesia (World Bank, 2021). Berikut ilustrasi kepentingan perubahan Indonesia menuju Blue Economy,



Gambar 4: Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia
Sumber: World Bank (2021)

Urgensi penerapan konsep blue ekonomi di Indonesia adalah sebagai berikut, 1) Memanfaatkan potensi laut: Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya sumber daya, seperti ikan, minyak, gas, terumbu karang, dan pariwisata. Dengan menerapkan blue ekonomi, Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan. 2) Menjaga



kelestarian lingkungan: Indonesia juga menghadapi berbagai ancaman terhadap lingkungan laut, seperti pencemaran, perusakan habitat, perubahan iklim, dan illegal fishing. Dengan menerapkan blue ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut dan mempertahankan keseimbangan ekosistem. 3) Meningkatkan kerja sama internasional: Indonesia dapat berperan aktif dalam kerja sama internasional terkait pengelolaan laut, seperti IORA, COP26, dan UNCLOS. Dengan menerapkan blue ekonomi, Indonesia dapat meningkatkan diplomasi maritim dan kontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian regional (Qisthi, 2021).

Urgensi Penerapan Blue Economy yang dapat mengembangkan kemampuan Pertahanan Laut di Indonesia

Blue economy adalah konsep yang mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Blue economy dapat membangun pertahanan laut dengan cara,

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan melalui peningkatan produktivitas, pendapatan, dan lapangan pekerjaan,
- 2) Menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem laut yang penting untuk ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, dan kesehatan lingkungan,
- 3) Mendorong kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi untuk mengembangkan inovasi, investasi, dan kebijakan yang mendukung ekonomi biru
- 4) Mempromosikan identitas maritim Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi dan tanggung jawab besar dalam pengelolaan laut, Melindungi kepentingan ekonomi, lingkungan, dan kedaulatan negara di wilayah laut,
- 5) Mendukung kebebasan berlayar dan kontribusi terhadap tata kelola yang baik dengan mencegah dan menangkal aktivitas ilegal dan tidak sah di domain maritim global.
- 6) Mendorong penelitian dan inovasi, pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan maritim² (Sambodo et al., 2023).

- 7) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas negara untuk merespons risiko dan ancaman keamanan maritim (European Commission, 2021),
- 8) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar negara dan sektor terkait dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan penanggulangan bencana di laut (Dinarto, 2017)

Studi Kasus: Keadaan Laut Natuna Utara

Saat ini, keadaan laut Natuna Utara masih menjadi sorotan karena konflik dengan China terkait klaim wilayah di Laut China Selatan. Pada Desember 2021, China menuntut Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim di Laut China Selatan, yang diklaim kedua negara milik mereka. Indonesia menegaskan bahwa ujung selatan Laut China Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik NKRI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan pada 2017 menamai wilayah itu Laut Natuna Utara. Konflik ini belum terselesaikan, tetapi Indonesia dan China tetap menjaga hubungan baik dan kerja sama di bidang lain (Iswara, 2021).

Ditahun 2021 lalu, 2 kapal asing milik Vietnam ditemukan melakukan illegal fishing dikawasan laut natuna utara. Ditahun yang sama bahkan KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) telah menangkap lebih dari 130 kapal asing di kawasan tersebut. Yang terdiri dari 84 kapal ikan Indonesia yang dianggap telah melanggar ketentuan, serta 46 kapan lainnya merupakan illegal fishing yang terdiri dari kapal-kapal asing yaitu, 15 kapan asing Malaysia, 25 kapan asing Vietnam hingga 6 kapal asing filiphina (Suwarsono, 2021).

Indonesia menegaskan sebuah kedaulatannya di Natuna Utara dengan melakukan beberapa tindakan, seperti Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan China dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan penanggulangan bencana di laut (Hasan, 2018) dan Menyatakan bahwa wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di mana kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara (Indonesia.go.id, 2020).



Urgensi Penerapan “Blue Economy” sebagai Pengembangan Kemampuan Pertahanan Laut. Studi Kasus: Laut Natuna Utara

Menurut Bakamla terdapat tiga strategi guna menghadapi perbatasan Laut Natuna Utara, yang salah satunya menyatakan bahwa Indonesia diharuskan untuk dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya laut maupun alam di perbatasan ZEE dan batas landas. Perihal ini akan menilai bahwa Indonesia tidak hanya mengklaim wilayah saja. Selain itu perihal ini juga dapat dilakukan oleh para nelayan, guna menghidupkan Kawasan tersebut (Puskodal Bakamla, 2021)

Pemerintah Indonesia sedang mengimplementasikan konsep blue ekonomi di Laut Natuna dan Natuna Utara. Potensi ekonomi yang ada di wilayah tersebut mencakup perikanan tangkap dan budidaya, pemasangan kabel telekomunikasi dan pipa bawah laut, eksplorasi minyak dan gas, wisata bahari, dan jalur pelayaran kapal lintas antarnegara. Dengan terbitnya Perpres 41/2022, para pelaku usaha diimbau untuk segera mengajukan PKKPR sebagai salah satu syarat pemanfaatan ruang laut secara legal dan berkelanjutan (Setiawan, 2022).

Walaupun pada akhirnya PKKPR dinilai akan lebih terhambat apabila belum diadakannya zonasi dan bersehubung dengan kegiatan di laut yang memiliki resiko yang tinggi. Maka, pepres mengeluarkan RZ KAW atau Rencana Zonasi antar Wilayah yang digambarkan dapat meningkatkan ekonomi, ekologi setar pertahanan dengan mengoptimalkan ruang laut (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022).

Dengan peraturan penggunaan ruang laut melalui prinsip ekonomi biru, maka Indonesia dapat menetapkan kegiatan laut yang dilaksanakan baik oleh Masyarakat, nelayan maupun pelaku usaha yang bersifat harmonis. Dengan kegiatan yang dimaksud seperti, penangkapan ikan, budidaya laut, pariwisata hingga pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Tiga Kawasan penting yang sedang direncanakan oleh pemerintah tiga dari salah satu Kawasan penting, yaitu laut natuna utara, dimana KKP dipastikan untuk selalu aktif kepada Kawasan tersebut hingga program ini tercapai (Dinas KOMINFO Provinsi Jawa Timur, 2022).

Melalui banyaknya permasalahan IUUF yang mengancam peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Maka, KKP menindak lanjuti perihal ini untuk selanjutnya tidak terjadi lagi dengan mengimplementasikan sebuah penangkapan ikan terukur guna sebagai keberlanjutan. Perihal ini tidak hanya berguna bagi IUUF saja, melainkan juga guna menjaga kelestarian ekosistem laut dan penguatan pengawasan sebagai peningkatan kualitas SDM. Dimana hal ini merupakan sebuah penerapan ekonomi biru yang akan berpotensi meningkatkan ekonomi laut berkelanjutan. Disisi lain, Pembangunan pipa dibawah laut sebagai pembatas penangkapan ikan, akan memudahkan para nelayan supaya dapat terhindar dari permasalahan perbatasan. Perihal ini dapat memperkuat pertahanan dan keamanan laut selaku Kawasan yang berbatasan langsung dengan negara ASEAN. Dimana apabila ekonomi laut meningkat maka pertahanan dan keamanan laut semakin ketat. Dengan demikian, maka potensi ekonomi yang ada di Laut Natuna dan Natuna Utara bisa dimanfaatkan secara legal (Ambari, 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa adanya sebuah kepentingan atau Urgensi di Indonesia untuk dapat menerapkan konsep Blue Economy atau Ekonomi Biru di Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan tiga perempat dari luas geografinya merupakan perairan laut. Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk dapat menerapkan ekonomi biru, sebagai peningkatan ekonomi laut berkelanjutan. Melalui studi kasus laut natuna utara dapat ditinjau bawasannya laut natuna utara sedang dalam permasalahan perbatasan mengingat kawasannya yang bertempatan diperbatasan dengan laut china Selatan. Perihal ini yang membuat banyaknya permasalahan di laut natuna utara dari IUUF yang marak terjadi, pengakuan Kawasan oleh china, hingga masuknya kapal asing secara illegal. Dengan adanya penerapan konsep ekonomi biru di Kawasan laut natuna utara maka Kawasan tersebut akan berkembang, para nelayan serta pelaku usaha berkembang dikawasan tersebut, mengeksploitasi sumber daya laut di LNU. Sehingga timbulah kehidupan dikawasan tersebut, disisi lain kehidupan Masyarakat persisir yang produktif akan menimbulkan budidaya laut hingga pengurusan



ekosistem yang teratur hingga lahirnya ekonomi maritim berkelanjutan secara bertahap. Dengan adanya kehidupan Masyarakat pesisir yang produktif akan menimbulkan pertahanan laut yang kuat dikarenakan kesibukan ekonomi yang meningkat dikawasan tersebut.

Rekomendasi

Walaupun Indonesia telah menggebu-gebu perihal penerapan konsep ekonomi biru di Kawasan Laut Natuna Utara. Tetapi hingga saat ini, Masyarakat pesisir masih dinilai kurang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Sehingga masih kurangnya perkembangan ekonomi maritim di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menyadarkan seluruh Masyarakat Indonesia perihal pentingnya pemeliharaan dan penjagaan sumber daya laut sebagai Pembangunan ekonomi maritim berkelanjutan. Sehingga tidak adanya kesenjangan antara penghasilan pendapatan ekonomi darat dan ekonomi laut. Melalui kolaborasi yang sempurna antara ekonomi darat dan laut maka akan menciptakan pertahanan negara yang kuat.

Daftar Pustaka

- Ambari, M. (2022). *Begini Implementasi Ekonomi Biru di Laut Natuna dan Natuna Utara*. Mongabay: Situs Berita Lingkungan.
- Civilsdaily. (2023). *[Burning Issue] Blue Economy: Prospects and Challenges*. Civilsdaily. <https://www.civilsdaily.com/blue-economy-india-challenges-prospects/>
- Darmawan, A. R., & Afriansyah, A. (2020). *Gauging Indonesia's interests in the South China Sea*. East Asia Forum: Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific. <https://www.eastasiaforum.org/2020/06/26/gauging-indonesias-interests-in-the-south-china-sea/>
- Dinarto, D. (2017). Indonesia's blue economy initiative: rethinking maritime security challenges. *RSIS Commentary*, 206. <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/11/CO17206.pdf>
- Dinas KOMINFO Provinsi Jawa Timur. (2022). *KKP Selesaikan RZ KAW untuk Optimalkan Ruang Laut Sesuai Ekonomi Biru*. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa

Timur. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kkp-selesaikan-rz-kaw-untuk-optimalkan-ruang-laut-sesuai-ekonomi-biru>

European Commission. (2021). *EU Blue Economy Observatory: Maritime defence*. European Commission. https://blue-economy-observatory.ec.europa.eu/eu-blue-economy-sectors/maritime-defence_en

Hasan, R. A. (2018). *Dubes AS ke Natuna, dukung kedaulatan RI dalam isu Laut China Selatan*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/dunia/dubes-as-ke-natuna-dukung-kedaulatan-ri-dalam-isu-laut-china-selatan.html>

Humas FHUI. (2023). *Gauging Indonesia's interests in the South China Sea by Aristyo Darmawan and Arie Afriansyah*. Fakultas Hukum UI. <https://law.ui.ac.id/gauging-indonesias-interests-in-the-south-china-sea-by-aristyo-darmawan-and-arie-afriansyah-3/>

Hwon, L. (2023). The Legality of Militarization of the South China Sea and Its Legal Implications. *KMI International Journal of Maritime Affairs and Fisheries*, 15(1), 1–24. <https://doi.org/10.54007/ijmaf.2023.e2>

Ikeshima, T. (2013). China's Dashed Line in the South China Sea: Legal Limits and Future Prospects. *Waseda Global Forum*, 10, 17–50.

Indonesia.go.id. (2020). *Mengawal Eksistensi Indonesia di Natuna*. Indonesia.Go.Id. <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/1616/mengawal-eksistensi-indonesia-di-natuna/>

Iswara, J. A. (2021). *Kronologi Konflik di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim sebagai Wilayahnya*. Kompas. <https://www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-engeboran>

Kaczan, D., & De Aquino, A. R. (2021). *Four strategies for a blue economy in Indonesia: Reflections from the Oceans for Prosperity report*. World Bank Blog. <https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/four-strategies-blue-economy-indonesia-reflections-oceans-prosperity-report>

KBBI. (n.d.). *Pengertian Urgensi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kamus Besar



- Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved October 22, 2023, from <https://kbbi.web.id/urgensi>
- Khoury, E. (2017). Recent Trends In the South China Sea Disputes. *Institut De Relations Internationales Et Strategiques*, 16(February), 1–11. www.iris-france.org
- Kraska, J., & Pedrozo, R. (2013). International maritime security law. In *International Maritime Security Law*. <https://doi.org/10.1163/9789004233577>
- Maujana, H. (2018). STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN. *Seminar Nasional P4M UNAS*, 1, 1–14.
- McBain, D. (2023). *What is the blue economy?* The London School of Economic and Political Science. <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-the-role-of-the-blue-economy-in-a-sustainable-future/>
- Puskodal Bakamla. (2021). *3 Strategi Kepala Bakamla jaga Perbatasan di Laut Natuna Utara*. IMI: Indonesia Maritime Information Centre. <https://imic.bakamla.go.id/berita/details/37/ini-3-strategi-kepala-bakamla-jaga-perbatasan-di-laut-natuna>
- Qisthi, N. M. (2021). *Konsep Blue Economy dalam Memajukan Perekonomian Indonesia yang Berkelanjutan*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/noviqisty/60efe95c06310e60976210d3/konsep-blue-economy-dalam-memajukan-perekonomian-indonesia>
- Sambodo, L. A. A. T., Putri Pane, D. D., Pertamawati, L. H., Maftukhah, S., Firdaus, I. T., Wikapuspita, T., Harianto, S. K., Nurrahmani, S. M., Nugrahaeni, T. A., Mukhairiq, M. T., Alfarisy, M. A. R., Manullang, R. A. M., Riyanto, R., Artika, K., Nurhaditia, F., & Tamadhika, R. (2023). *Indonesia Blue Economy Roadmap*. Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS). https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Dir_Industri%2C_Ekonomi_dan_Kreatif/ENG_Indonesia_Blue_Economy_Roadmap_ebook_ISBN.pdf
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Perpres RZ KAW Terbit, KKP Kawal Pemanfaatan Ruang Laut di Tiga Kawasan Antarwilayah*. Setkab.Go.Id.



<https://setkab.go.id/perpres-rz-kaw-terbit-kkp-kawal-pemanfaatan-ruang-laut-di-tiga-kawasan-antarwilayah/>

Setiawan, T. H. (2022). *KKP Akan Manfaatkan Ruang Laut Natuna-Natuna Utara Sesuai Ekonomi Biru*. Kementrian Kelautan Dan Perikanan. <https://kkp.go.id/artikel/40874-kkp-akan-manfaatkan-ruang-laut-natuna-natuna-utara-sesuai-ekonomi-biru>

Surwade, N. (2017). *The South China Sea Conundrum and the ASEAN Unity*. Indian Defence Review. <http://www.indiandefencereview.com/spotlights/the-south-china-sea-conundrum-and-the-asean-unity/>

Suwarsono, D. A. (2021). *KKP Tangkap Dua Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Laut Natuna Utara*. Kementrian Kelautan Dan Perikanan. <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/33498-kkp-tangkap-dua-kapal-asing-pelaku-illegal-fishing-di-laut-natuna-utara>

World Bank. (2017). *What is the Blue Economy?* The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2017/06/06/blue-economy>

World Bank. (2021). *Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia*. The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2021/03/25/oceans-for-prosperity-reforms-for-a-blue-economy-in-indonesia>